



Aset Lapangan Basket Besang Terbengkalai

Semarapura (Bali Post) -

Lapangan basket yang ada di Desa Besang, Kelurahan Semarapura Tengah, Klungkung hingga kini kondisinya sangat memprihatinkan. Lapangan yang sangat potensial karena berada di pinggir Jalan Ngurah Rai ini sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Kondisi bangunannya rusak dan fasilitas lapangan yang sudah keropos ini tidak layak lagi digunakan untuk berolahraga. Sayangnya sampai saat ini belum ada perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki fasilitas olahraga tersebut.

Pantauan di lokasi, lapangan basket ini penuh dengan coret-coretan di dindingnya. Aset ini kumuh, bahkan tak bisa dimanfaatkan lagi. Sebelumnya, lapangan ini sering dimanfaatkan siswa SMA dan SMP yang ada di Klungkung seperti SMPN 2 Semarapura dan SMAN 2 Semarapura karena menjadi alternatif terdekat untuk berolahraga. Mengingat fasilitas olahraga di GOR Desa Gelgel sangat jauh dari sekolah.

Dikonfirmasi terkait dengan aset yang terbengkalai tersebut, Kabid Aset Bappeda Klungkung Wayan Ardiasa mengungkapkan pihaknya masih mengupayakan untuk mensertifikatkan lapangan basket yang telantar ini. Menurutnya, sebelumnya tidak ada yang mengetahui siapa pemilik dari lapangan basket di Besang itu.

Namun, setelah dilakukan penelusuran, baru diketahui bahwa lapangan di Besang ini masuk ke dalam aset milik pemkab. Kini aset tersebut tercatat berada di bawah Bagian Perlengkapan berdasarkan hasil pendataan. Saat ditanyai fasilitas olahraga yang terbengkalai, pihaknya pun tidak mengetahui siapa yang membuat lapangan basket itu karena sebelumnya tidak tercantum di Pemkab Klungkung.

Ia mengatakan Bagian Aset sedang berusaha untuk menuntaskan sertifikat lapangan basket tersebut. Hanya fasilitas lapangan basket yang dimanfaatkan sejumlah sekolah untuk berolahraga ini akan dirombak menjadi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klungkung. Kini pembangunan gedungnya masih menunggu alokasi dari pusat. Wayan Ardiasa mengakui pada proses pensertifikatan, pihaknya mengalami sedikit keterlambatan karena terjadi kekeliruan saat melakukan pengajuan. "Sekarang masih diproses sertifikatnya. Sebelum pasti aset tersebut milik pemkab, kami tidak berani memohonkan sertifikat," ujarnya. (dwa)

Edisi : salasa, 5 Mei 2015

Hal : 16



Dugaan Korupsi Pengadaan Pupuk

Kejari Amlapura

Tetapkan Dua Tersangka

Amlapura (Bali Post) -

Kejaksanaan Negeri (Kejari) Amlapura menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk tahun 2013 di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Karangasem. Dua tersangka itu diketahui berinisial Komang Sub dan Ham. Komang Sub diketahui sebagai kepala dinas di Karangasem. Sementara, tersangka berinisial Ham diketahui sebagai pihak rekanan.

Kabar penetapan dua tersangka itu menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Karangasem. Sumber di internal Kejari Amlapura, Senin (4/5) kemarin, membenarkan pihaknya sudah menetapkan dua tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara Kamis pekan lalu. Rencananya, kedua nama tersangka ini akan disampaikan pada Rabu (6/5) besok. "Siapa orangnya, nanti tunggu hari Rabu saja," ujar sumber ini. Siapa nama terang kedua tersangka itu belum bisa disampaikan, mengingat Sprindik

(Surat Perintah Penyidikan) belum turun. Penanganan kasus ini berjalan mulus sejak Februari lalu. Sebelum menetapkan tersangka, Kejari Amlapura telah melakukan pemeriksaan sebanyak 20 orang saksi yang diduga terlibat dalam kasus ini. Baik dari kelompok tani selaku penerima, pihak swasta selaku rekanan, maupun pemerintah setempat.

Pengadaan pupuk ini berbau korupsi, karena pengadaannya menyalahi prosedur, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

nomor 39 tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos). Pemberian hibah ini difasilitasi anggota dewan saat itu. Masyarakat yang ingin mendapatkan pupuk seharusnya mengajukan proposal terlebih dahulu yang difasilitasi anggota dewan. Anehnya, masyarakat sudah mendapat pupuk terlebih dahulu, sementara proposalnya disesuaikan belakangan. Pengadaan pupuk ini menghabiskan anggaran Rp 800 juta dalam dua kali penganggaran. Melalui APBD Induk sebesar Rp 300 juta dan APBD Perubahan sebesar Rp 500 juta.

Berapa kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini, juga masih dirahasiakan.

Pupuk yang sudah dibeli langsung diberikan kepada delapan kelompok tani di Kecamatan Manggis, Kubu, Rendang, dan Karangasem. Tiga kelompok menerima pupuk melalui APBD Induk, dan sisanya menerima melalui APBD Perubahan. Kejari Amlapura yang dikonfirmasi Senin (4/5) kemarin, belum bisa menjelaskan perihal penetapan tersangka kasus ini. "Tunggu saja. Nanti Rabu kami sampaikan," ujarnya melalui pesan singkat. Sementara, tersangka Komang Sub yang dihubungi Senin (4/5) kemarin, mengaku belum tahu kalau pengadaan pupuk yang dilakukan dinasnya dulu, sudah menetapkan dirinya sebagai tersangka. "Belum... belum tahu, terakhir saya dipanggil

dimintai keterangan sebagai saksi," kata Komang Sub.

Ia mengaku sudah dipanggil dan memberikan keterangan sebanyak dua kali. Ia menegaskan, tidak mengenal rekanan berinisial Ham yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Kalaupun benar ia ditetapkan sebagai tersangka, Komang Sub mengaku belum bisa berkomentar. Sebab, keterangan resmi dari pihak Kejari Amlapura belum ada. Sementara, disinggung perihal pengadaan pupuk saat itu, dia mengaku sudah lupa berapa menghabiskan anggaran. Namun, Komang Sub menegaskan proses pengadaan pupuk tersebut saat itu sudah sesuai aturan. "Itu (anggaran) dulu Kabid saya di sana lebih tahu. Saya rasa waktu itu prosesnya sudah sesuai prosedur," terang Komang Sub. (kmb31)

Edisi : Selasa, 5 Mei 2015

Hal : 15



Kasus CPNS

Penyidik Tetapkan Dua Tersangka

Tabanan (Bali Post) -

Setelah memeriksa sejumlah saksi dengan masa yang cukup panjang, akhirnya penyidik Kejari Tabanan menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan pemerasan CPNS di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Tabanan. Keduanya itu I Gede Jagrem (JG), mantan Kabid Peralatan dan Angkutan DKP yang kini menjabat sebagai Kabid Promosi dan Pengendalian di Disnaker, serta satu orang lagi Candra Dewi (CD) yang menjabat Kasubag Hukum dan Kepegawaian di DKP. Penetapan kedua tersangka tersebut diberberkan langsung Kajari Tabanan Atang Bawono, Senin (4/5) kemarin.

Menurut pejabat asal Sukaharjo ini, untuk memecahkan misteri siapa yang bertanggung jawab terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan DKP, pihaknya telah membentuk tim sejak awal Maret 2015 lalu. "Tim inilah yang kemudian bekerja keras mengumpulkan alat bukti untuk memperkuat penyidikan," ungkapnya.

Dari hasil penyidikan dan alat bukti serta diperkuat oleh keterangan sejumlah saksi, keduanya dipastikan naik status dari saksi menjadi tersangka. "Bukti sudah kuat, dan status kedua tersangka sudah naik dari saksi menjadi tersangka," ucapnya. Penetapan itu diputuskan setelah tim penyidik melakukan ekspos kasus pada Selasa (28/4) lalu.

Selanjutnya, kata Atang, pihaknya terus menyempur-

nakan penyidikan, jika nanti dalam perkembangannya ada alat bukti lain bukan tidak mungkin pihaknya akan menetapkan tersangka lain. "Sampai saat ini baru ditetapkan dua tersangka, tidak menutup kemungkinan kalau ada alat bukti lain akan ditetapkan tersangka lain," tandasnya.

Ditambahkannya, setelah ditetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut, tim penyidik akan segera memanggil keduanya untuk kembali diperiksa sebagai tersangka. "Secepatnya akan kita panggil untuk diperiksa," pungkasnya.

Seperti diketahui, kasus dugaan pemerasan CPNS di DKP yang diduga melibatkan pejabat setempat, pihak Kejari Tabanan telah memeriksa 43 orang saksi, baik dari staf DKP, staf instansi lain dan masyarakat umum.

Kedua tersangka juga sempat diperiksa penyidik sebagai saksi, Kamis (23/4) lalu. I Gede Jagrem dan Candra Dewi disebut-sebut meminta sejumlah uang kepada CPNS di DKP. Dari informasi yang dihimpun, Gede Jagrem yang saat ini menjabat sebagai Kabid Promosi dan Pengendalian di Disnaker dan Candra Dewi memenuhi panggilan kejaksaan sekitar pukul 13.00 wita. Keduanya pun dihadapkan dengan penyidik. Kehadiran keduanya ditemani pengacara yakni I Gede Wija Kusuma, Ni Nengah Saliani dan Putu A. Hutagalung. Ditambahkannya, dalam pemeriksaan tersebut setidaknya Jagrem mendapat pertanyaan sekitar 60 yang kesemuanya terkait kisruh CPNS di DKP Tabanan, sedangkan untuk Candra Dewi hanya diajukan sedikitnya 24 pertanyaan. (kmb28)

Edisi : selasa, 5 Mei 2015

Hal : 12



Menteri Agraria Tolak Reklamasi Laut

PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan memberikan izin kepada pengusaha yang ingin mereklamasi laut. Pasalnya, Indonesia adalah negara kelautan. Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengatakan hal itu saat menjadi pembicara di Gedung Mina Bahari III, Selasa lalu.

Ferry mengungkapkan, saat

ini banyak pengusaha meminta izin rekomendasi reklamasi laut di Indonesia. Menurutnya, reklamasi laut adalah pemikiran keliru dari masyarakat negara kelautan. Sebab, kegiatan reklamasi tersebut, menjadikan tata ruang laut di Indonesia menjadi lebih sempit. "Reklamasi di Batam contohnya, kalau ingin ruko dan gerai ATM buat apa reklamasi? Yang dirugi-

kan biota laut, batas garis pantai bergeser, nilai ekonomi tanah menjadi agak ke dalam dan nilainya turun," tuturnya.

Ia pun mengingatkan jangan sampai proyek reklamasi laut dilakukan hanya menguntungkan satu pihak, tetapi justru merugikan banyak pihak.

Hal. 23

Gerai ATM

"Di berbagai negara, reklamasi laut justru dilakukan untuk keperluan mempertahankan negara. Seperti di Korea Selatan, reklamasi laut dipergunakan untuk membangun jaringan jalan yang bisa sewaktu-waktu digunakan untuk landasan pesawat tempur mereka. Berbanding terbalik dengan Korea, di Indonesia reklamasi laut dilakukan hanya untuk keperluan komersial."

Menteri Agraria dan Tata Ruang
Ferry Mursyidan Baldan

Edisi : Jelasa, 5 Mei 2015

Hal : 1



Sambungan - - -

Gerai ATM

Dari Hal. 1

Ia mencontohkan di Manado, Sulawesi Utara, proyek reklamasi laut hanya dijadikan sebagai tempat dibangunnya ruko-roko dan gerai ATM berbagai bank.

Di berbagai negara, reklamasi laut justru dilakukan untuk keperluan mempertahankan negara. Seperti di Korea Selatan, reklamasi laut dipergunakan untuk membangun jaringan jalan yang bisa sewaktu-waktu digunakan untuk landasan pesawat tempur mereka. Berbanding terbalik dengan Korea, di Indonesia reklamasi laut dilakukan hanya untuk keperluan komersial.

Apa yang disampaikan Ferry Mursyidan Baldan sempat menjadi diskusi hangat dalam pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan beberapa waktu lalu. Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Arif Satria mendukung segera diberlakukan RUU itu yang masuk dalam Prolegnas 2015. Menurutnya, sudah saatnya negara melindungi dan memberdayakan nelayan yang saat ini makin terpinggirkan.

"Sekarang kalau nelayan itu yang diprioritaskan, kompensasinya seperti apa. Itu juga yang harus dipikirkan. Yang penting juga dari upaya melindungi nelayan adalah melindungi dari kegiatan-kegiatan reklamasi," kata Arif Satria dalam diskusi Forum Legislasi bertema "RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan" di Gedung DPR beberapa minggu lalu.

Arif yang juga Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (FEMA IPB) ini mengatakan, ada banyak bentuk perlindungan yang

bisa dijamin dalam regulasi dan ketentuan perundangan terhadap nelayan. "Kalau di Jepang, perlindungan terhadap nelayan, ya... benar-benar tidak ada reklamasi. Tetapi, bisa juga dengan jalan tengah, misalnya walaupun benar-benar akan direklamasi, maka reklamasinya agak menjorok ke tengah laut. Terus dampaknya memang ada, tetapi tetap harus dikesankan hijau. Namun tampaknya swasta tidak akan mau, karena investasinya tentu akan sangat besar," imbuhnya.

Arif mengaku setuju dengan upaya kaji ulang proyek reklamasi. Dia pun menekankan evaluasi harus dilakukan oleh tim independen yang benar-benar memahami. Sehingga hasil kajian benar-benar mendapat keputusan objektif tentang layak-tidaknya suatu wilayah direklamasi.

"Untuk yang di Bali, memang mereka sudah mengeluarkan amdal, tetapi kan amdalnya juga harus dicek lagi, diverifikasi ulang. Benar enggak buat amdalnya?" ujarnya.

Arif memprediksi persoalan reklamasi di Bali jauh lebih *complicated* dibandingkan persoalan di Jakarta. Untuk di Jakarta saja, menurutnya, Provinsi Lampung yang akan dijadikan wilayah yang menjadi galian sumber tanah untuk reklamasi akan terkena terdampak. "Kalau misalnya yang di Jakarta direklamasi, tetapi di Lampung menjadi rusak karena mengambil tanah reklamasi dari sana. Kan tidak benar juga. Justru sumber tanah yang perlu diperhatikan," katanya.

Oleh karena itu, ketika bicara reklamasi, menurut Arif, semua aspek perlu dikaji benar termasuk dari mana

sumber tanah galian untuk menjadi sumber tanah reklamasi. "Jangan hanya direklamasi saja, kalau yang di sini direklamasi, tentu akan ada dampak di wilayah lain yang diambil tanahnya dan akan merusak," tandasnya.

Arif mengatakan, dari kajian fakultasnya, semua bermuara pada hasil yang objektif. "Kita tidak melihat siapa di belakang itu, tetapi proyeknya saja. Objektif saja, mengganggu tidak terhadap lingkungan dan aspek sosial, ekonomi dan kultural. Apalagi di Bali," tegasnya.

Sebelumnya, Komisi IV DPR-RI juga telah membuat kesimpulan terkait rencana reklamasi Teluk Benoa. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BP, 28/1) disepakati proses yang sudah berjalan selama ini dihentikan dan dilakukan kajian ulang secara menyeluruh.

Adapun bunyi kesimpulan yang terdapat dalam poin 6 kesimpulan yakni; Komisi IV DPR-RI meminta pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghentikan reklamasi Teluk Jakarta dan tidak melanjutkan rencana reklamasi Teluk Benoa, serta mengkaji ulang prosesnya sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Menurut Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo, dari masukan Menteri Kelautan dan Perikanan, reklamasi akan menimbulkan daerah resapan air berkurang. "Bali yang selama ini tidak banjir, jangan sampai gara-gara reklamasi menjadi banjir. Maka dari itu, kita hentikan dulu, termasuk dari sisi aturannya," katanya. (kmb4)



Tunggakan Pajak Capai Rp 10 Miliar

Didominasi PBB

Bangli (Bali Post) -

Tunggakan wajib pajak hingga bulan April 2015 ini tercatat sebesar Rp 10 miliar. Tunggakan ini didominasi dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tak pelak, hal ini membuat pemerintah daerah harus bekerja ekstra untuk menyelesaikan persoalan ini.

Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bangli Gd. Suryawan, Senin (4/5) kemarin mengungkapkan, tunggakan pajak ini merupakan limpahan piutang dari kantor pelayanan pajak pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan berita acara yang diserahkan pada bulan Januari 2014 lalu. Besaran tunggakan wajib pajaknya pun terbilang tinggi, yakni mencapai Rp 11 miliar. Namun, dalam kurun waktu satu tahun, beberapa pajak itu sudah ada yang terbayar, hingga sisanya sampai saat ini mencapai Rp 10 miliar.

Dikatakan, tunggakan ini lebih banyak berasal dari pajak bumi dan bangunan. Ia juga tidak menampik bahwa pajak lain juga mengalami penunggakan, namun nominalnya tidak begitu besar. "Penunggakan wajib pajak ini lebih banyak berasal dari PBB, untuk yang lain tidak begitu banyak," jelasnya.

Terkait dengan jumlah yang belum melunasi tunggakan pajak ini, dikatakan Suryawan, datanya masih ada pada sistem objek pajak. "Datanya harus kami *print out* dulu, setelah itu kami baru tahu berapa jumlah penunggaknya. Untuk lama tunggakannya bervariasi," ujarnya.

Kendatipun pihak Dispenda sudah mengantongi data pada sistem objek pajak, ternyata untuk *print out*-nya dikatakan tidak bisa dalam waktu singkat lantaran hal ini memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Pihak Dispenda harus kembali mengajukan anggaran ke pemerintah daerah untuk membiayai proses *print out* data wajib pajak ini. Jika data penunggak sudah ada, pihaknya akan berkoordinasi dengan perangkat desa untuk melakukan klarifikasi.

"Kami belum bisa melakukan *print out* secara cepat. Hal itu memerlukan biaya tinggi. Kami perlu ajukan anggaran dulu ke pemda," terangnya. Ditambahkan Suryawan, untuk mengimbangi pendataan tunggakan pajak ini, pihaknya juga sudah merancang alternatif yang dimungkinkan mampu mempercepat pelunasan tunggakan pajak ini, mulai dari melakukan kerja sama dengan Lembaga Perkereditan Desa (LPD), koperasi, dan pihak perbankan yang masih sehat.

Pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk melayani daerah yang tertinggal atau pedesaan, pihaknya juga me-

Edisi : Selasa, 5 Mei 2015

Hal : 10



Sambungan - -



PAJAK - Salah satu wajib pajak.

rencanakan pengadaan mobil pembayaran pajak keliling. "Beberapa terobosan kami lakukan untuk menyikapi hal ini. Kami berusaha dan berkomitmen memberikan pelayanan yang

maksimal kepada masyarakat," ucapnya.

Suryawan berharap kepada masyarakat yang selama ini menunggak pajak agar segera melunasinya. Mengingat, pajak

yang dibayarkan ini juga nantinya diperuntukkan pada pembangunan daerah. "Masyarakat harus sadar untuk membayar pajak. Hal itu juga untuk pembangunan daerah," pintanya. (kmb45)

Bali Post/dok

Edisi : Selasa, 5 Mei 2015

Hal : 10